



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)**

TESIS

AZAM AKHMAD AKHSYA

2110622011

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2024**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

AZAM AKHMAD AKHSYA

2110622011

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2024**

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)**

AZAM AKHMAD AKHSYA

2110622011

Telah disetujui untuk Ujian Tesis



Dr.Slamet Tri Wahyudi , S.H., M.H.
NIDN . 0027018603

Jakarta, Januari 2024
Mengesahkan.



Dr.Handar Subhandi Bakhtiar,S.H.,M.H.,M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 19930428 202203 1009

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Azam Akhmad Akhsya
NIM : 2110622011
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta

Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M

Ketua Penguji

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH.,MH

Penguji Utama

Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH.,MH

Penguji Kedua , Pembimbing



Dr. Sulherman, SH., LL.M

Dekan

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,
S.H.,M.H.,M.Tr.Adm.Kes

Kaprodi

Ditetapkan : Di Jakarta
Tanggal Ujian : 05 Januari 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : AZAM AKHMAD AKHSYA

NIM : 2110622011

Tanggal : 05 Januari 2024

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta , 05 Januari 2024

Yang Menyatakan



Azam Akhmad Akhsya

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azam Akhmad Akhsya
NIM : 2110622011
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)” .

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/menformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Januari 2024

Yang Menyatakan



Azam Akhmad Akhsya

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE POLICIES
AGAINST PERSONS OF CRIMINAL ACTS OF NEGLIGENCE THAT
CAUSED DEATH**

**(Study of Circular Letter of the Solicitor General for General Crimes
Number 01/E/EJP/02/2022 about the Implementation of Termination of
Prosecution Based on Restorative Justice)**

AZAM AKHMAD AKHSYA

ABSTRACT

Requests for termination of prosecution of perpetrators of criminal negligence that cause death can be rejected or granted even if they use the same technical guide, namely Circular Letter of the Solicitor General for General Crimes Number 01/E/EJP/02/2022. Based on this background, the research focuses on understanding the parameters of restorative justice policies against perpetrators of negligence that cause death and the ideal implementation of restorative justice for perpetrators of negligence. This research is normative juridical research with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The request for Restorative Justice was granted because the parameter of negligent acts was not purely in the perpetrator's self but was also carried out by the victim himself. In contrast, the request was rejected because *culpa* only came from the perpetrator's actions. The ideal implementation of a restorative justice policy must lead to efforts to restore it to its original state, ensure there is no negative stigma from the community, and it is oriented towards technical efficiency and legal certainty for the parties. The research results suggest that the termination of cases based on restorative justice requires certainty of technical regulations, for example, through the Attorney General's Regulations. The ideal implementation of restorative justice policies must pay attention to a unified written policy/*lex scripta* that is publicly accessible, testable, integrative between justice mechanisms, functional differentiation of criminal justice, and the harmonization of subjects and objects in prosecutions.

Keywords: Restorative Justice Policy, Parameters, Ideal Implementation

**(Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor
01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif)**

AZAM AKHMAD AKHSYA

ABSTRAK

Permohonan penghentian penuntutan kepada pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dapat ditolak ataupun dikabulkan sekalipun menggunakan satu panduan teknis yang sama yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022. Berdasarkan latar belakang ini maka penelitian berfokus untuk memahami parameter kebijakan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dan implementasi ideal keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana kelalaian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Permohonan Restorative Justice dikabulkan karena parameter perbuatan lalai bukan murni ada pada diri pelaku melainkan juga dilakukan oleh korban itu sendiri sedangkan permohonan ditolak karena *culpa* hanya berasal dari perbuatan pelaku. Implementasi ideal kebijakan restorative justice harus mengarah pada usaha pemulihan kembali pada keadaan semula, tidak ada stigma negatif dari masyarakat, serta berorientasi pada efisiensi teknis dan kepastian hukum bagi para pihak. Saran dari hasil penelitian adalah penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif membutuhkan kepastian peraturan teknis misalnya melalui Peraturan Jaksa Agung. Implementasi ideal kebijakan keadilan restoratif nantinya harus memperhatikan: satu kesatuan kebijakan tertulis/ *lex scripta* yang dapat diakses publik, dapat diuji, integratif antar mekanisme peradilan dan memperhatikan diferensiasi fungsional peradilan pidana, serta harmonisasi subyek dan obyek dalam penuntutan.

Kata kunci: Kebijakan Keadilan Restoratif, Parameter, Implementasi Ideal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA.** Tesis ini disusun sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta.

Pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan moril dan materiil sehingga rancangan tesis ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bpk. Dr. Anter Venus, MA. Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
2. Dr. Suherman, SH, LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
3. Bpk Dr. Beniharmoni Harefa SH, LL.M selaku Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta sampai bulan Juni 2023;
4. Bpk Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes selaku Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
5. Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH., MH selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, semangat dan motivasi;
6. Bpk dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta.
7. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
8. Keluarga tercinta Ayah, ibu, istri dan anak anak yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat dalam menyusun tesis ini,

9. Teman teman seperjuangan Magister Hukum tahun 2021 Universitas Pembangunan Nasiolan Veteran (UPN Veteran) Jakarta.

Kami menyadari tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis berharap saran , kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga tesis dapat memberi manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut. Akhir kata penulis berharap kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, aparat penegak hukum dan pemerintah serta masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wr . wb

Jakarta, 13 Juli 2023

Azam Akhmad Akhsya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
I.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
I.2. PERUMUSAN MASALAH	15
I.3. TUJUAN PENELITIAN	15
I.4. MANFAAT PENELITIAN	15
I.5. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL	16
I.6. METODE PENELITIAN	23
I.7. SISTEMATIKA PENULISAN	28
BAB II.....	30
TINJAUAN PUSTAKA	30
II.1. Politik Hukum	30
II.2. Tindak Pidana Kelalaian dalam Hukum Indonesia	33
II.3. Keadilan Restoratif di Indonesia	41
BAB III	48
METODE PENELITIAN.....	48
III.1. Tipe Penelitian	48
III.2. Sifat Penelitian	48
III.3. Sumber Penelitian	48
III.4. Teknik Pengumpulan Data.....	50
III.5. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV	53
PEMBAHASAN	53
IV.1. Parameter Implementasi Kebijakan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/Ejp/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).....	53
IV.1.1. Kebijakan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian.....	53
IV.1.2. Parameter Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian.....	68

IV.2. Implementasi Ideal Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian	83
BAB V	109
PENUTUP.....	109
V.1. Kesimpulan	109
V.2. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111